

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah sentral di Indonesia sampai saat ini adalah isu kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia baik terkait dengan kesenjangan sosial maupun dengan masalah pembangunan antar daerah, diantaranya yang tercermin dalam pendidikan dan kesehatan yang buruk, serta rendahnya pendapatan dan daya beli. Oleh karena itu diperlukan penanggulangan yang sinergis dan sistematis dalam penanganan kemiskinan yang bertujuan untuk mengangkat dan melindungi masyarakat dari kemiskinan dan segala penyebabnya. Upaya terencana tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk memperkuat semangat dan kemandirian masyarakat miskin untuk dapat berpartisipasi penuh sebagai pelaku dalam berbagai tahapan pembangunan. Dalam konteks ini, pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi sangat penting dan strategis karena jumlahnya yang relatif besar, sehingga secara langsung berdampak pada pencapaian kemaslahatan bangsa dan negara (Mukti, 2015).

Penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan secara terfokus sekaligus dapat menghindari penggunaan dana pemerintah untuk kegiatan yang tidak produktif. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar (Juliansyah, 2016). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Haerisma, 2016).

Pada penelitian ini, pemberdayaan masyarakat yang dimaksud ialah dalam aspek ekonomi. Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural (Nisa, Jaelani & Syafrudin, 2021).

Adapun pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam, Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha). Hak akan harta milik perseorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan seperti dalam sistem kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral (Jaelani, 2014).

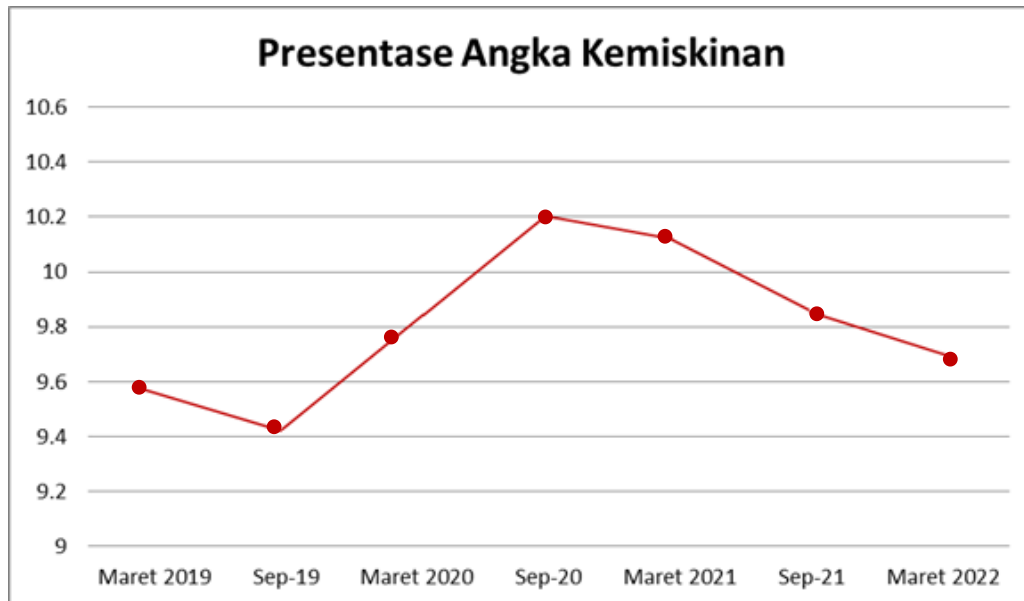
Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya, baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia, maupun di akhirat (Abdul Aziz et al., 2019). Menurut Islam, makna pembangunan memiliki arti yang sangat luas dengan menekankan pembangunan insan atau manusia seutuhnya (human development). Puncaknya adalah kehidupan yang seindah-indahnya (fi ahsani taqwim) (Haerisma, 2016).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera sangatlah penting untuk direalisasikan, melihat kondisi sekarang perekonomian perlahan pulih pasca adanya pandemi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* merupakan ujian bagi suatu bangsa dalam mempertahankan ketahanan dan kesejahteraan negaranya. *Corona Virus Diseases 2019* atau disebut dengan nama lain *Covid-19* merupakan permasalahan global yang menyita

perhatian banyak orang di berbagai belahan dunia. Krisis multidimensi yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* ini datang begitu cepat dan menguji kerapuhan yang dimiliki suatu negara di berbagai bidang (Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020).

Dilansir dari laman web Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi *Covid-19*. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengurangi rantai penyebaran pandemi *Covid-19*, namun kebijakan ini menyebabkan berkurangnya jumlah konsumsi Rumah Tangga (RT) dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) padahal kedua konsumsi ini sangat memberi pengaruh atas kontraksi pada Produk Domestik Bruto (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).





Gambar 1. Grafik Presentase Angka Kemiskinan di Indonesia

Sumber : Laporan Badan Pusat Statistik

Grafik diatas merupakan presentase laju angka kemiskinan di Indonesia terhitung dari 4 tahun terakhir yang disampaikan dalam Laporan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mencatat, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022. Angka ini mengalami penurunan 0,17 poin dibandingkan September 2021 yang sebesar 9,71%. Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2022 menunjukkan perbaikan yaitu yang terendah semenjak pandemi *Covid-19* melanda Tanah Air. Misalnya pada Maret 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,78%. Persentase penduduk miskin terus mengalami peningkatan pada September 2020 sebesar 10,19% dan Maret 2021 sebesar 10,14% (Laporan Badan Pusat Statistik 2022).

Meski demikian, turunnya angka kemiskinan di Indonesia belum mampu mencapai angka yang lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi *Covid-19*. Pandemi corona telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian. Perusahaan Negara banyak yang mengalami kerugian. Sektor usaha swasta pun berangsur runtuh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, tak hanya industri yang

terganggu, pandemi *Covid-19* juga akan menambah pengangguran. Ia mempred-iksi, dalam skenario berat potensi pengangguran akan bertambah 2,92 juta orang dan bisa bertambah sangat besar bisa mencapai 5,23 juta. Ini artinya pengangguran di Indonesia bertambah banyak.

Peneliti juga menemukan data pengangguran di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon terhitung dari tahun 2018-2022. Data tersebut ialah sebagai berikut :

Wilayah Jawa Barat	[SUPAS 2015] Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)	
	2018	2019
Cirebon	10,64	10,35
Kota Cirebon	9,07	9,04

Catatan: Sakernas Agustus 2018-2021 menggunakan penimbang hasil SUPAS 2015. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Sumber: Sakernas Agustus 2022

Wilayah Jawa Barat	[SUPAS 2015] Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Cirebon	11,52	10,38	8,11
Kota Cirebon	10,97	10,53	8,42

Catatan: Sakernas Agustus 2018-2021 menggunakan penimbang hasil SUPAS 2015. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Sumber: Sakernas Agustus 2022

Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota Cirebon

Sumber : Laporan Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Selain data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon tersebut, tingginya angka pengangguran di Kabupaten / Kota Cirebon juga disampaikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon mencatat hingga tahun 2022, dari jumlah penduduk 2,3 juta orang, sekitar 11,52 persen masih menganggur. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Joni Kasmuri menyampaikan bahwa penduduk usia kerja pada Agustus 2022 di Kota Cirebon sebanyak 250.126 orang, naik sebanyak 2.322 orang jika dibandingkan Agustus

2021. Disebutkannya, komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 149.860 orang penduduk yang bekerja dan 13.779 orang pengangguran (Fajarcirebon, 2022).

Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar untuk mengatasi masalah pengangguran. Jika masalah pengangguran ini tidak segera di atasi, maka akan muncul berbagai macam tindak kejahatan seperti: pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan. Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat sudah selayaknya menciptakan lapangan pekerjaan baru yang inovatif, dan kreatif di tengah pandemi *Covid-19* ini agar angka pengangguran berkurang dan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya (Rohmah & Syari, 2020).

Dalam perkembangan kebijakan ditengah pandemi, pemerintah menerapkan kebijakan yang disebut *New Normal* sebagai tanggapan atas krisis yang diakibatkan oleh *Covid-19*. Tentunya berbagai kebijakan yang dihasilkan berdampak langsung pada segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. *New Normal* hadir untuk memastikan efisiensi dalam merespon berbagai aspek masyarakat, mulai dari mikro, meso dan makro, serta beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Bagi pemerintah Indonesia, *New Normal* merupakan skenario untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dengan tetap menekankan penerapan protokol kesehatan yang ketat (Putsanra, 2020).

Pada sektor ekonomi, adanya kebijakan *New Normal* ini mengakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dari pandemi *Covid-19*. Sebagai sektor dengan posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional, UMKM terus menghadapi tantangan terkait akses permodalan, terutama di masa / pasca pandemi *Covid-19*. Dalam hal ini untuk meningkatkan usahanya masyarakat memerlukan modal. Salah satu cara mendapatkan modal adalah melalui lembaga keuangan bank (Herwina).

Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang membolehkan bank konvensional untuk membuat dan memiliki Unit Usaha Syariah dan membuka layanan syariah pada kantor cabang bank konvensional. Akan tetapi karena usaha lapisan bawah memiliki keterbatasan jangkauan dari bank, banyak para rentenir yang meminjamkan dana kepada pelaku usaha kalangan bawah dengan kebijakan bunga yang cukup tinggi. Hal ini sangat jelas mendzolimi orang-orang yang lemah secara ekonomi, seperti yang dikutip oleh Yunus (2009:7) yang membahas tentang kehadiran BMT (baitul maal wa tamwil) yaitu untuk menghilangkan para rentenir, yang sangat jelas menjerat kalangan usaha kecil dan menengah dengan jeratan hutang yang berbunga tinggi. Yang mana BMT dalam pengertian lain yaitu Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (Winardi, 2012).

Pada saat Indonesia mengalami masa-masa sulit bahkan disebut krisis ekonomi pasca pandemi, BMT banyak berperan dalam pemberdayaan masyarakat hingga ke lapisan bawah. Dengan kata lain, BMT sering melakukan pendekatan dan bantuan kepada kalangan usaha kecil dan menengah untuk mendorong kemajuan usaha mereka (Muhammad Asyhuri, 2013). Karena BMT bukan bank syariah dan lebih berorientasi pada pemberdayaan, maka sudah tentu landasan filosofinya berbeda dengan bank.

Objek penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Bahjah pusat yakni bertempat di Jalan Pangeran Cakrabuana No. 179 Blok. Gudang Air Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, tepatnya dikompleks LPD Al-Bahjah Cirebon. Koperasi Simpan Pinjam Syariah dengan Badan Hukum NO. 20/BH/KUMKM/III/2016 yang diharapkan menjadi sarana pemberdayaan bagi masyarakat, baik di lingkungan Pondok Pesantren Al-Bahjah maupun masyarakat pada umumnya (Al-Bahjah.or.id).

Sebagaimana terlampir dalam profil BMT Al-Bahjah, koperasi tersebut mempunyai program pemberdayaan masyarakat yang bisa direalisasikan dengan produk simpan pinjam maupun produk pembiayaan syariah. Dalam berinteraksi dengan masyarakat, manusia seringkali terbentur dengan kemauan dan kemampuan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya, apalagi dalam keadaan pasca pandemi ini. Oleh karena itu sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa uang maupun barang. Dan ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, maka hal itu mempunyai nilai kebaikan dan pahala besar disisi Allah. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 245, yang menegaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan terhadap sesamanya berupa pinjaman baik berupa uang atau barang di jalan Allah SWT., maka Allah akan melipatgandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah (Sunarsa, 2022).

Berdasarkan beberapa fakta yang peneliti paparkan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui produk pembiayaan syariah di era *New Normal*, agar dapat dijadikan bahan rancangan pemerintah dalam pembuatan program kesejahteraan masyarakat. Tujuannya agar masalah sosial ekonomi yang muncul dikemudian hari dapat terselesaikan. Kemudian dapat membantu lembaga keuangan dalam mengupayakan perbaikan dan peningkatan kerangka kebijakan terkait kelembagaan, dan pembiayaan lainnya, yang diarahkan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna secara partisipatif, dengan mengoptimalkan peran dan manfaat produk pembiayaan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengidentifikasi fenomena masalah kemiskinan yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*. Perekonomian Indonesia mengalami deflasi semenjak adanya pandemi, bahkan angka pengangguran di Kabupaten dan Kota Cirebon juga mencapai 11,53 %. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan pemulihan ekonomi yang salah-satunya melalui pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara memberdayakan masyarakat agar produktif.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada analisis pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui produk pembiayaan syariah di era *New Normal*, dan dari segi perekonomian masyarakat.

3. Pertanyaan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui produk pembiayaan syariah di era *New Normal*, dengan pendekatan studi kasus pada KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon. Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bagaimana pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui produk pembiayaan syariah pada KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon di era *New Normal*?
- b. Bagaimana pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui produk pembiayaan syariah pada KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon dalam perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui produk pembiayaan syariah pada KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon di era *New Normal*.
2. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui produk pembiayaan syariah pada KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon dalam perspektif Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Menyumbangkan pemikiran bagi masyarakat luas untuk memahami pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui produk pembiayaan syariah di era *New Normal*.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Sebagai referensi bagi pemerintah pusat atau daerah untuk kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
 - c. Penelitian ini diharapkan menjadi hasil penelitian yang akan memberikan kontribusi positif bagi kita semua, khususnya jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan umumnya dibidang keilmuan Ekonomi Islam.

E. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah menelaah beberapa penelitian berdasarkan penelusuran, peneliti mendapatkan beberapa teori dan hasil penelitian analisis pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui produk pembiayaan syariah di era *New Normal*.

1. Alvien Septian Haerisma (2016) menemukan bahwa pola-pola pemberdayaan ekonomi (Kasus Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Cirebon) yaitu membangun kesadaran dan kekuatan ekonomi umat, pembentukan dan pengembangan Koperasi Syariah “INSAN MULIA”, penggalangan kerjasama dan jaringan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Cirebon dalam pemberdayaan ekonomi umat yaitu paradigma berfikir, banyaknya sumber daya manusia yang purna waktu, penyadaran pada umat seperti faktor modal atau biaya, sumber daya manusia yang bersifat mobilitas ekonomi personal terbatas (Haerisma, 2015).

Kelebihan dari penelitian terdahulu tersebut adalah gagasannya menggunakan dasar teori yang jelas, referensi dan pembahasannya juga sangat berhubungan. Namun kelemahan dari penelitian terdahulu ini ialah penyantuman referensi yang kurang lengkap, sehingga sulit diakses oleh peneliti yang hendak mengutipnya. Referensi merupakan salah satu hal penting yang seharusnya diperhatikan oleh penulis jurnal tersebut, agar penelitian selanjutnya dapat mengutip dari sumber yang jelas. Adapun persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu diatas, objek penelitian pemberdayaan yang dilakukan pada organisasi masyarakat yakni ormas Muhammadiyah Kota Cirebon. Sedangkan pada penelitian ini, pemberdayaan ekonomi

yang dilakukan melalui produk pembiayaan syariah, dengan objek pada KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon.

2. Inayatun Nisa, Aan Jaelani, dan Syafrudin (2021) menemukan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi syariah di LPD Al-Bahjah lebih mengembangkan usaha bisnis dalam bidang barang dan jasa yang meliputi unit usaha Al-Bahjah Tour & Travel, BMT Al-Bahjah, AB Mart, Al-Bahjah Laundry, dan AB Chicken. Adapun faktor pendukung pemberdayaan ekonomi di LPD Al-Bahjah adalah adanya figur Kiai yang kharismatik, pemberdayaan SDM yang berkelanjutan, kerjasama antar divisi yang apik, adanya konsumen yang tetap dan jelas, serta modal usaha yang memadai. Sementara itu, faktor yang menghambatnya adalah SDM yang belum mencukupi dan tempat unit usaha yang kurang memadai. Namun demikian, pemberdayaan ekonomi syariah di LPD Al-Bahjah ini dapat dijadikan role model bagi pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren lainnya (Nisa & Jaelani, 2021).

Kelebihan dari penelitian terdahulu tersebut adalah hasil analisisnya relevan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian skripsi ini yakni mengenai pemberdayaan perspektif Islam, sehingga peneliti sangat terbantu oleh penelitian terdahulu tersebut. Namun kelemahan dari penelitian terdahulu ini pemaparannya tidak menyajikan data dalam bentuk table, grafik, maupun dokumentaasi. Data dalam bentuk apapun menjadi hal penting dalam sebuah penelitian, karena masuk dalam kriteria keakuratan penelitian. Penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki banyak kesamaan, salah satunya objek penelitian yang sama yakni studi kasus pada Al-Bahjah, dan sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu tersebut, pemberdayaan yang diteliti melalui Lembaga Pendidikan Dakwah (LPD) yakni Pesantren dan secara luas. Sedangkan pada penelitian ini, pemberdayaan yang diteliti melalui

hanya melalui produk pembiayaan syariah oleh BMT Al-Bahjanya.

3. Putri Elvina S.C (2022), menemukan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mutiara Padang Besi telah memenuhi perannya sebagai lembaga keuangan, dan telah membantu masyarakat Kelurahan Padang Besi meningkatkan pendapatan anggota, khususnya anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan memberikan bantuan modal usaha kepada anggota koperasi, dan mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis syariah menumbuhkan ekonomi masyarakat kalangan bawah memberikan dampingan usaha dan penambahan modal dalam wadah koperasi (Caniago, 2022).

Kelebihan dari penelitian terdahulu tersebut adalah referensi yang cukup jelas dan pembahasannya juga sangat berhubungan. Namun kelemahan dari penelitian terdahulu ini ialah menggunakan bahasa yang bertele-tele / tidak lugas. Pembahasan seharusnya menggunakan kalimat yang lugas agar pembaca mudah memahami gagasan yang disampaikan oleh penulis. Persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dan berobjek pada KSPPS. Perbedaannya terletak pada subjeknya, penelitian terdahulu tersebut menganalisis masalah / peran KSPPS secara umum untuk pemberdayaan ekonomi. Sedangkan penelitian ini hanya menganalisis pemberdayaan ekonomi melalui produk pembiayaan syariah yang dilakukan pada era *New Normal*.

4. M. Subari (2017) menemukan bahwa umat Islam berkewajiban untuk mengangkat harkat dan martabat kaum fakir dan miskin. Hal ini banyak peringatan yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Maun ayat 1 dan 3 dan hadits Nabi SAW. Kefakiran lebih mendekati pada kekufuran, tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah. Untuk mengangkat harkat dan martabat dan menanggulangi

masyarakat fakir dan miskin yakni dengan strategi memberdayakan ekonomi masyarakat fakir dan miskin. Strategi pertama merubah mindset dari mental peminta-minta menjadi mental pengusaha atau entrepreneurship. Kedua diberi wawasan dan pelatihan keterampilan usaha. Ketiga diberikan modal usaha sehingga mereka dapat menggunakan modal usaha dengan baik dan benar. Dan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin perlu pendamping yang professional yang ahli di bidang pemberdayaan masyarakat, dan entrepreneurship, dan lain-lain yang selalu mendampingi masyarakat fakir dan miskin. Sehingga pemberdayaan masyarakat fakir dan miskin bisa diatasi (Subari, 2017).

Kelebihan dari penelitian terdahulu tersebut adalah gagasannya disertai dengan landasan-landasan teori yang jelas dan dapat dimengerti oleh pembacanya . Namun kelemahan dari penelitian terdahulu ini ialah tidak mendorong adanya penelitian selanjutnya. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat miskin. Akan tetapi ada perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut hanya mengulas tentang strategi pemberdayan masyarakat dalam perspektif Islam, sedangkan pada penelitian ini, pembahasan bukan sekedar pemberdayan masyarakat dalam perspektif Islam, namun juga dengan pembahasan produk pembiayaan syariah sebagai subjeknya.

5. Ulfa Husna Sa'idah (2021) menemukan bahwa dampak *Covid-19* adalah menurunnya penjualan produk, namun berangsur membaik selama era normal baru (*New Normal*). Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses implementasi program UPPKS ini adalah lemahnya komitmen masyarakat, perubahan perilaku setelah mendapatkan pinjaman modal, dan penyimpangan gaya hidup (Sa'idah, 2021).

Kelebihan dari penelitian terdahulu tersebut adalah pembahasannya disajikan dengan jelas serta penulisan jurnal yang rapi. Namun kelemahan dari penelitian terdahulu ini ialah kurangnya data dalam pembahasan yang disajikan, pembahasan hanya berupa uraian gagasan. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas masalah sosial ekonomi akibat pandemi *Covid-19*, serta mengulas bagaimana memperkuat ketahanan ekonomi di era *New Normal* melalui program pemberdayaan. Akan tetapi, permasalahan yang diteliti berbeda, pada penelitian terdahulu diatas, permasalahan yang diteliti ialah ketahanan ekonomi keluarga berbasis pemberdayaan perempuan melalui program UPKKS. Sedangkan pada penelitian ini, permasalahan yang diteliti ialah pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui produk pembiayaan syariah pada BMT.

6. Agus Lukman Hakim, dkk (2022) menemukan bahwa pertama, terdapat 12 kegiatan yang memiliki nilai USG tinggi. Diperlukan dukungan prioritas kegiatan dan anggaran untuk dilaksanakan. Kedua, terdapat 31 kegiatan yang memiliki kategori sedang. Dengan kategori tersebut, kegiatannya dapat terus dilaksanakan karena bermanfaat dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi *Covid-19* walaupun dampak manfaatnya sedang. Ketiga, terdapat 12 kegiatan yang termasuk kategori rendah sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan kegiatan tersebut dengan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi pemulihan ekonomi masyarakat (Hakim et al., 2022).

Kelebihan dari penelitian terdahulu tersebut adalah pembahasan mengenai topik terbaru, menyajikan data yang cukup lengkap, serta penulisannya rapi. Namun kelemahan dari penelitian terdahulu ini ialah tidak adanya gagasan untuk mendorong penelitian selanjutnya. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai program pemberdayaan masyarakat yang

dapat memulihkan kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi / era *new normal*. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu tersebut, tidak terfokus pada satu program, sedangkan pada penelitian ini hanya terfokus pada program pemberdayaan ekonomi melalui produk pembiayaan syariah oleh BMT.

7. Ni'mah (2021) menemukan bahwa adanya dampak signifikan perubahan sistem operasional koperasi akibat era *New Normal*, yaitu perubahan sistem operasional pada kinerja karyawan yang harus menerapkan protokol kesehatan. Dampak lainnya ialah terhambatnya sistem permodalan koperasi karena ketidakmampuan anggota untuk melakukan pembayaran wajib, hal ini dikarenakan anggota koperasi sendiri yang mengalami PHK (Ni'mah, 2021).

Kelebihan dari penelitian terdahulu tersebut adalah pembahasan topik mengenai permasalahan aktual, juga penyajian abstrak yang memuat kesimpulan berdasarkan permasalahannya. Namun kelemahan dari penelitian terdahulu ini ialah kurangnya data dalam pembahasan. Persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai dampak dari era *New Normal* terhadap keberlangsungan operasional koperasi syariah. Perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu tersebut subjek yang dianalisis hanya dampak era *New Normal* nya saja, sedangkan pada penelitian ini subjeknya ialah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui produk pembiayaan syariah pada koperasi syariah di era *New Normal*.

8. Ardian Dwi Bagus S dan Muhammad Nafik HR (2017) menemukan bahwa Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera berperan dalam pemberdayaan ekonomi anggota melalui produk pembiayaan yang ditawarkan. Produk – produk tersebut berupa pembiayaan dengan berbagai variasi dan model yang tentunya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda antara satu produk dengan produk lainnya. Namun terdapat faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi

kesuksesan ataupun kegagalan dalam peran koperasi syariah dan informan sendiri (Saputro & Riyandono, 2017).

Kelebihan dari penelitian terdahulu tersebut adalah pembahasan yang cukup jelas dan gagasannya disampaikan secara lugas. Namun kelemahan dari penelitian terdahulu ini ialah tidak mengandung unsur permasalahan yang aktual. Persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi melalui produk pembiayaan syariah oleh koperasi syariah. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu tersebut masalah yang dianalisis itu secara umum, sedangkan pada penelitian ini permasalahan yang dianalisis fokus pada pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan syariah pasca adanya pandemi atau di era *New Normal*.

9. Miki Indika dan Yayuk Marliza (2019) menemukan bahwa upaya pemberdayaan UMKM dalam rangka mengatasi kemiskinan di kecamatan Tugumulyo yaitu melalui pengembangan secara internal dari pengelola UMKM dengan cara pengadaan permodalan, inovasi hasil produk dan perluasan jaringan. Sebagai sektor utama penyerapan tenaga kerja, kemajuan UMKM akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya, sehingga jumlah penduduk miskin akan menurun (Indika & Marliza, 2019).

Kelebihan dari penelitian terdahulu tersebut adalah pembahasannya menyajikan data yang cukup lengkap dalam bentuk table. Namun kelemahan dari penelitian terdahulu ini ialah penulisan yang kurang rapi dan penyampaian gagasan yang kurang lugas. Penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki 2 kesamaan, yaitu sama-sama menganalisis faktor pembantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga berobjek pada koperasi. Perbedaannya terletak pada objeknya, pada penelitian terdahulu tersebut berobjek

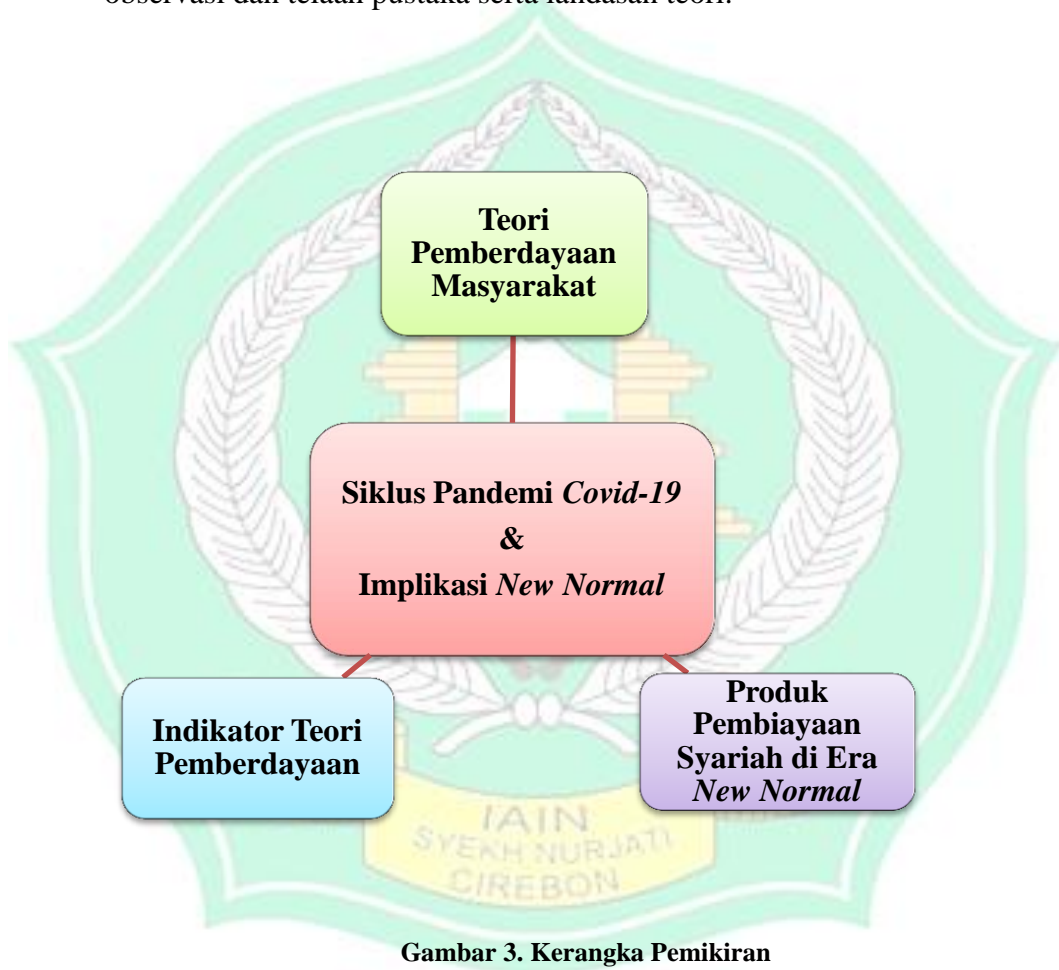
pada koperasi konvensional yang turut meminjamkan modal usaha, sedangkan pada penelitian ini objek yang diteliti ialah lembaga keuangan koperasi syariah BMT sebagai penyalur pembiayaan syariah yang dilakukan pasca pandemi atau era *New Normal*.

10. Riyan Pradesyah (2021) menemukan bahwa Indonesia terus mencoba untuk mempertahankan perekonomiannya agar tidak terlalu jatuh, tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tidak dapat bertahan lama. Hal tersebut dapat dilihat dari instrument terkecil yang sekarang terus menjadi pusat perhatian pemerintah, yaitu pengusaha atau UMKM. Untuk itu instrument syariah dengan menggunakan akad mudharabah atau kerjasama bagi hasil, dapat menjadi alternative pemerintah dalam melakukan kerjasama antara masyarakat atau UMKM, guna untuk mempertahankan perekonomian Indonesia di era *New Normal* saat ini (Pradesyah, 2021).

Kelebihan dari penelitian terdahulu tersebut adalah permasalahan yang diteliti memiliki unsur aktual yakni mengenai era *New Normal*, dan dapat menjadi referensi dalam penelitian ini. Namun kelemahan dari penelitian terdahulu ini ialah kurangnya data yang disajikan. Dalam suatu penelitian seharusnya dapat memuat data yang cukup agar pembahasan dinilai akurat oleh pembaca. Persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas pembiayaan serta pemulihan ekonomi pasca pandemi atau *New Normal*. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya, pada penelitian terdahulu tersebut subjek yang dianalisis hanya mudharabah di era *New Normal*. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi permasalahannya bukan hanya produk pembiayaannya saja, akan tetapi dengan perannya sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Rianse dan Abdi (dalam Muchson, 2017) mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka serta landasan teori.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang peneliti buat diatas, dalam penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Melalui Produk Pembiayaan Syariah di Era *New Normal* pada KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon” ini, menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut beberapa ahli. Teori pemberdayaan Rubin menyatakan bahwa dalam pemberdayaan setiap proses harus memberikan hasil, pemberdayaan

dalam pelaksanaan dan perencanaannya selalu melibatkan masyarakat, dalam kegiatan pemberdayaan kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik harus berjalan beriringan, pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya dan terakhir pemberdaya harus bisa memfungsikan diri sebagai penggerak (Rabbani, et al., 2021).

Selanjutnya pemberdayaan menurut Jim Ife (2008), yaitu pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas sumberdaya manusia. Upaya menyediakan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, mengambil bagian dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan melihat arah dan tujuan dari perkembangan masyarakat, maka sasaran pengembangan masyarakat adalah individu, kelompok, dan lingkungan baik itu lingkungan fisik dan lingkungan sosial (Marzuki et al., 2019).

Menurut Edi Suharto dalam Alfitri (2011:26-27), pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P yaitu:

- a. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Jadi pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat tersebut.
- b. Penguatan, yaitu adanya penguatan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat mampu berkembang dan percaya diri dengan segenap kemampuannya yang mana akan menunjang kemandirian masyarakat.
- c. Perlindungan, yaitu adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari kelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini akan mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.
- d. Penyokongan, yaitu adanya dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan

mampu memberikan dukungan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan.

- e. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha.

Adapun indikator teori pemberdayaan menurut Sri Wulan yang dikutip oleh Haerisma (2016), yakni dalam mencapai fokus dan tujuan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan indikator pemberdayaan untuk mencapai target yang diinginkan. Terdapat 8 aspek indikator pemberdayaan masyarakat yang disebut juga sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kebebasan mobilisasi yakni kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu maupun pergi sendiri.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil maksudnya kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, terlebih jika ia dapat membelibarang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar maknanya kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam membuat keputusan seperti mampu membuat sendiri maupun bersama mengenai keputusan-keputusan keluarga seperti memperoleh kredit usaha.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
- f. Kesadaran hukum dan politik.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes dimaksudkan seseorang dianggap “berdaya” jika ia pernah terlibat kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.

- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga dan lingkungan seperti memiliki rumah, tanah, aset produktif dan tabungan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu direalisasikan pasca terjadinya siklus pandemi *Covid-19*. Siklus pandemi *Covid-19* dan implikasi *New Normal* merupakan salah-satu permasalahan yang dirasakan oleh berbagai negara khususnya di Indonesia. Hal ini menjadi pusat perhatian pemerintah dan lembaga keuangan dari tingkat pusat sampai daerah. Banyak lembaga keuangan yang berkontribusi untuk membantu menekan angka kemiskinan di Indonesia, salah-satunya dengan cara menyalurkan dana pembiayaan. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya berbagai program dan penelitian topik pemetaan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039). Pasal 1 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial”, juga diperkokoh dengan dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi :

“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencaharian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.” (United Nations, hlm. 1948).

Masalah sosial ekonomi menjadi topik prioritas setelah topik kesehatan. Kondisi perekonomian masyarakat prasejahtera perlu diberi perhatian lebih, hal ini dikarenakan masalah ekonomi masyarakat kecil yang lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat menengah keatas. Apalagi dengan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang merupakan respon atas pandemi yang terjadi, masyarakat harus menjalani perubahan sosial ekonomi secara tiba-tiba. PSBB yang diputuskan melalui PP Nomor 21 tahun 2020 dalam upaya mempercepat penanggulangan

Covid-19 sehingga hampir seluruh masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari di dalam rumah termasuk kegiatan bekerja. Kerentanan kriminalitas akibat PHK, pengangguran harus ditanggung oleh buruh pabrik, para pekerja sektor non formal ini semakin memperpanjang persoalan pada saat perubahan sosial yang tiba-tiba muncul dan harus dihadapi tanpa persiapan tabungan apalagi asuransi, oleh sebab itu, peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. (Puspitasari & Resmalasari, 2021).

Menteri Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan sekitar 50 hingga 70 juta dari 133 juta pekerja Indonesia bekerja di sektor informal, sangat terpengaruh oleh peraturan yang tampaknya mengurangi tingkat infeksi. Pandemi telah mengubah pola hubungan sosial dan mengoyak pola kehidupan normal di masa lalu. Perubahan yang dihasilkan dari *Covid-19* bersifat mendasar dan permanen, menembus lapisan terbawah dari tatanan sosial. Jawa Barat merupakan provinsi yang semakin naik kasus pandemi ini, sehingga dikeluarkannya Peraturan Daerah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan PSBB berdampak terhadap warga yang kesehariannya bekerja sebagai pedagang, pelayanan yang penghasilannya didapatkan dengan cara bertemu langsung dengan para konsumen atau kliennya (Eliyani et al., 2020).

Masalah sosial ekonomi di era *New Normal* ini merupakan fenomena sosial ekonomi yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Dengan penelitian analisis pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui produk pembiayaan syariah di era *New Normal* ini, dapat menjadi penunjang untuk memperoleh data tentang masalah sosial ekonomi masyarakat miskin / prasejahtera pasca pandemi *Covid-19 (New Normal)* dan pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan syariah. Data yang sudah diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk merancang hasil akhir dari penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Menurut Chariri, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan *setting* tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atau sejumlah kasus atau kasus tunggal (Fadli, 2021).

Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran ialah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi social mereka (Danim, 2002). Alasan penggunaan pendekatan kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk memahami hal-hal yang tersembunyi di balik fenomena yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini harus mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang ditemuinya secara lengkap, rinci, dan mendalam. Menurut setiawan dan Anggito, dalam (Fadli, 2021) tujuan penelitian kualitatif dapat dilihat dari:

- a. Penggambaran obyek penelitian (*describing object*); agar obyek penelitian dapat dimaknai maka perlu digambarkan melalui cara memotret, memvideo, meilustrasikan dan menarasikan. Penggambaran ini dapat dilakukan terhadap obyek berupa peristiwa, interaksi sosial, aktivitas sosial religious, dan sebagainya.
- b. Mengungkap makna di balik fenomena (*exploring meaning behind the phenomena*); makna dibalik fenomena/fakta dapat

diungkap bila peneliti memperlihatkan dan mengungkapkan melalui wawancara mendalam (*dept interview*) dan observasi berpartisipasi (*participation observation*).

- c. Menjelaskan fenomena yang terjadi (*explaining object*); fenomena yang tampak di lapangan terkadang tidak sama dengan apa yang menjadi tujuan, menjadi inti persoalan atau dengan kata lain yang tampak berbeda dengan maksud utama, sehingga perlu adanya penjelasan secara detail, rinci dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus atau *case-study*, adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi (Raco, 2018). Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Melalui Produk Pembiayaan Syariah di Era *New Normal* pada KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon” langsung kepada pihak yang bersangkutan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kaharuddin dalam (Sosiologi et al., 2021), data kualitatif dicirikan dengan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan dimana peneliti akan melakukan penelitian. Data primer pada penelitian ini didapat langsung dari hasil observasi, pengamatan serta wawancara kepada beberapa narasumber terkait pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui pembiayaan syariah.
- b. Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau

digunakan oleh lembaga/perorangan lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data primer yang diperoleh dari observasi ini diperkuat dengan data studi dokumentasi dari berbagai dokumen seperti arsip kegiatan, jurnal, karya ilmiah, peta, photo-photo dan lain sebagainya.

Sumber data utama dari penelitian kualitatif ini berupa informasi dan tindakan dari para informan atau pihak yang memahami dan mengetahui permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan dikumpulkan informasi tersebut dalam bentuk narasi kata-kata, tuturan serta tindakan sebagai hasil wawancara mendalam terhadap informan kunci.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah produk pembiayaan syariah, dan objek penelitiannya adalah KSPPS BMT Al-Bahjah. KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon yang diteliti dalam penelitian ini dianggap mampu mewakili lembaga keuangan koperasi syariah lainnya yang memiliki program pemberdayaan ekonomi yang sama.

Metode pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti memiliki kriteria tertentu yang dapat dijadikan sebagai informan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat 4 (empat) langkah yang harus dilakukan terkait dengan pengumpulan data, yaitu penetapan “*setting*” (dimana dan kapan penelitian dilakukan), “*actors*” (siapa yang diobservasi dan diwawancara), “*events*” (apa yang dilakukan oleh aktor tersebut), dan “*process*” (proses perubahan yang terjadi dalam event) (Miles dan

Huberman dalam Creswell: 2003:267). Dalam penelitian yang akan dilakukan, *setting* yang diamati adalah gambaran keadaan masalah sosial ekonomi masyarakat prasejahtera di Indonesia pasca pandemi, sebagai objek penelitian yang menjadi salah-satu sasaran program pemberdayaan melalui produk pembiayaan syariah di era *New Normal*. *Actors*nya adalah karyawan KSPPS BMT Al-Bahjah, serta informan lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. *Events*nya adalah menggali masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh *actors* penelitian khususnya karyawan KSPPS BMT Al-Bahjah sebagai upaya memperoleh gambaran kebijakan produk pembiayaan syariah di kemudian hari. Observasi dilaksanakan sejak bulan September 2022 – Januari 2023. Sedangkan waktu penelitian menyesuaikan dengan waktu luang dari masing-masing informan.

Pada penelitian ini, agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumen.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia (Raco, 2018).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung kepada KSPPS BMT Al-Bahjah, dengan menganalisis data produk pembiayaan, serta mendatangi jenis-jenis ekonomi mandiri milik Yayasan Al-Bahjah. Hal tersebut berguna bagi peneliti untuk menyusun pertanyaan wawancara, serta untuk mengetahui jaringan *market* BMT Al-Bahjah. Selain itu, observasi juga dilakukan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Observasi dianggap cocok untuk penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana langkah pemberdayaan masyarakat miskin melalui produk pembiayaan syariah, dan juga ingin mengetahui masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh

masyarakat miskin pasca pandemi. Kegiatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh peneliti karena data yang diperoleh didasarkan pada realitas, pengamatan dan pengalaman yang dialami masyarakat miskin secara langsung. Penggunaan teknik observasi ini memungkinkan peneliti melihat, mengamati dan mencatat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga kredibilitas data yang diperoleh untuk penggambaran masalah pun lebih akurat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian (Imam, 2015).

Dalam menentukan narasumber, peneliti melakukan beberapa pertimbangan, antara lain sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan mendalam dan berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Narasumber merupakan karyawan KSPPS BMT Al-Bahjah
3. Pernah menjadi nasabah koperasi syariah manapun, atau pernah menggunakan produk pembiayaan syariah.
4. Kondisi fisik hunian, beban tanggungan keluarga serta mata pencaharian masyarakat yang menjadi penjasar bahwa masyarakat tersebut termasuk kedalam golongan masyarakat miskin/ pra sejahtera.

Pertimbangan-pertimbangan diatas berfungsi sebagai landasan bagi peneliti dalam memilih narasumber yang tepat, serta memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan kriteria di atas, maka narasumber yang memenuhi kriteria, yaitu :

1. Pejabat / karyawan KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon
2. Nasabah / anggota koperasi syariah

3. Masyarakat miskin / prasejahtera

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti unik dalam studi kasus yang tidak ditemui dalam interview dan observasi. Dokumen berupa material yang tertulis yang tersimpan. Dokumentasi dapat berupa memorabilia atau korespondensi (Raco, 2018).

Adapun jenis dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni dokumen fisik dan dokumen intelektual. Dokumen fisik peneliti dapatkan dari pengambilan gambar sarana prasarana pada saat melakukan observasi. Dokumen fisik yang didapat langsung dari lokasi penelitian yaitu dokumen Company Profile KSPPS BMT Al-Bahjah dan dokumen Produk BMT Al-Bahjah. Dokumen intelektual peneliti dapatkan dari wawancara langsung kepada narasumber dan dari beberapa literatur sekunder mengenai permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2008). Analisis data dalam kualitatif bersifat deduktif yaitu berfikir dari yang umum menuju ke yang khusus. Proses analisis data dalam kualitatif sebenarnya terjadi sejak dilakukan pengumpulan data lapangan, dimana peneliti mulai memperhatikan berbagai kelengkapan data yang diperlukan berdasarkan rumusan masalah yang akan dijawab (Sosiologi et al., 2018). Menurut Miles dan Huberman dalam (Adriyani et al., 2003), terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi (Adriyani et al., 2003).

6. Validasi Data Temuan

Validasi data temuan dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang sudah diperoleh di lapangan. Tahapan ini biasa dikenal dengan uji validitas serta realibilitas data dimana data yang diperoleh ditindak lanjut untuk mengetahui valid atau tidaknya data tersebut. Dalam validasi data suatu penelitian dilakukan melalui prosedur teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan prosedur untuk mengecek keabsahan data melalui berbagai sumber dengan berbagai cara (Bachri, 2010). Adapun jenis triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data-data yang sudah

diperoleh dideskripsikan, dikategorikan mana pandangan yang sama, berbeda ataupun spesifik dari data tersebut.

b. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang sudah diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik yang berbeda. Adapun teknik yang dilakukan yakni dengan wawancara. Apabila hasil dari tahapan tersebut ditemukan adanya perbedaan dari data sebelumnya, maka peneliti harus menanyakan kembali kebenaran dari data tersebut kepada informan yang sama. Sehingga peneliti mampu memperoleh kejelasan dari data tersebut serta kredibilitas data yang terjamin.

c. Trianggulasi Waktu

Trianggulasi waktu dilakukan melalui teknik wawancara, pengamatan ataupun teknik lain. Hal ini dilakukan karena waktu mampu mempengaruhi validasi data, sehingga perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang dalam waktu yang berbeda dari waktu pertama pengambilan data tersebut.

7. Lokasi dan Rancangan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Bahjah Cirebon.

b. Rancangan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan selama 6 (enam) bulan, dimulai bulan September 2022 hingga Februari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Januari 2023	Februari 2023
1.	Penyusunan Proposal	✓					
2.	Perizinan		✓				
3.	Seminar Proposal			✓			
4.	Pelaksanaan penelitian				✓		
5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan laporan					✓	
6.	Seminar Hasil						✓

Tabel 2. Rancangan Waktu Penelitian

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu yaitu pendahuluan, menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu landasan teori tentang Pemberdayaan Masyarakat, Pembiayaan Syariah, Koperasi, dan *Era New Normal*. Pada bab ini, akan diuraikan tentang landasan teori mengenai pemberdayaan masyarakat prasejahtera, uraian tentang pembiayaan syariah, dan tinjauan Baitul Maal

Wat Tamwil secara umum, dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat di era *New Normal*.

Bab ketiga yaitu gambaran umum KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum BMT Al-Bahjah Cirebon, yang meliputi profil lembaga, jenis-jenis usaha yang dijalankan, serta kebijakan pembiayaan syariah yang diberlakukan.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui produk pembiayaan syariah di era *New Normal* pada KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon. Kemudian menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam.

Bab kelima yaitu penutup, penguraian mengenai kesimpulan akhir dari hasil temuan peneliti pada saat penelitian, dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil temuan yang telah peneliti uraikan.

